



## INTISARI

Penelitian berjudul “Kesenjangan Pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah Antar Wilayah di Kabupaten Banyumas” ini dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan, masih banyaknya anak usia sekolah yang tidak dapat mengenyam pendidikan formal. Disamping faktor ekonomis, distribusi fasilitas pendidikan juga tidak merata. Banyak sekolah yang kekurangan murid dan sebaliknya kelebihan murid. Kesenjangan pembangunan pendidikan akhirnya muncul, sebagai akibat dari adanya ketidakseimbangan distribusi fasilitas pendidikan dan ketidakseimbangan vertikal, dimana lulusan pendidikan dasar tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Penelitian ini bertujuan mengkaji kesenjangan pembangunan pendidikan antar wilayah di Kabupaten Banyumas. Kesenjangan ini dapat dilihat dari tingkat pembangunan pendidikan yang berbeda secara mencolok, baik peringkat maupun jumlah antar peringkat. Dikaji pula faktor dominan yang membentuk tingkat pembangunan pendidikan dasar dan menengah, dan beberapa faktor eksternal yang mempengaruhinya yaitu PDRB per kapita, rasio desa beraspal dengan jumlah desa, kepadatan penduduk (Jumlah penduduk dibagi luas wilayah), investasi, dan rasio desa bertopografi datar dengan jumlah desa.

Dalam mengukur pembangunan pendidikan, digunakan empat variabel yaitu daya serap, daya tampung, produktifitas, dan daya layan yang diperoleh dari analisa data sekunder. Keempatnya menggunakan pengguna aktual sebagai sasaran yaitu pengguna fasilitas pendidikan pada saat ini yang benar-benar memanfaatkan fasilitas tersebut. Penduduk usia sekolah diperoleh dengan melakukan pemecahan umur dari kelompok umur lima tahun menjadi satu tahun, kemudian dikelompokkan lagi berdasar usia sekolah yaitu SD (7-12 tahun), SLTP (13-15 tahun), SLTA (16-18 tahun). Analisa statistik digunakan sebagai alat bantu dalam membuktikan 5 hipotesa yang dipilih : analisa faktor dan korelasi *product moment*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk tingkat SD, pembangunan pendidikan telah merata di seluruh kecamatan, dan lebih ditentukan oleh daya layan sekolah dan guru serta kemampuan sekolah dalam menyerap siswa. Satu-satunya faktor eksternal yang mempengaruhi pembangunan pendidikan adalah rasio desa beraspal dengan jumlah desa. Sebaliknya kesenjangan pembangunan pendidikan sangat mencolok pada tingkat SLTP. Terdapat dua kecamatan pada peringkat tertinggi yang memiliki selisih satu peringkat dengan kecamatan lain. Hal ini menunjukkan adanya pembangunan pendidikan yang tidak seimbang, hanya terfokus pada kecamatan tertentu. Sementara faktor eksternal yang dipilih, tidak satupun berpengaruh terhadap tingkat pembangunan pendidikan SLTP yang dibentuk oleh jumlah lulusan, fasilitas pelayanan pendidikan, dan kemampuan menyerap siswa. Untuk tingkat SLTA, Sub Wilayah Pembangunan I (SWP I) menempati peringkat tertinggi. Dengan didominasi kecamatan-kecamatan sebagai Pusat Pelayanan I dan salah satunya sebagai pusat pemerintahan kabupaten, hal ini membawa pengaruh pula pada perkembangan pembangunan pendidikan yang melebihi SWP lain. Perhatian hendaknya diarahkan pada SWP lain agar meningkat pembangunan pendidikannya sehingga mempersempit kesenjangan yang terjadi.



## ABSTRACT

The research titled “Imbalance in Developments Between Basic and Middle Education Among Districts in Banyumas Regency” was based on the fact that there were many school-aged children having no formal education. In addition to economical factors, the uneven distribution of education facilities was the another factor. There were many schools lacking of students and, in another side, there were those having students more than their capacity. Then, imbalance in education developments occurred, as results of imbalance in distributions of education facilities and vertical imbalance, in which basic-education graduates could not continue to the higher education.

The research was purposed to evaluate imbalance in education developments in districts of Banyumas Regency. This imbalance could be observed from striking differences in the level of education developments, either level or number among levels. It was also evaluated dominant factors forming the level in developments of basic and middle education, and some influencing external factors, those were *PDRB* per *kapita*, village with asphalted roads and number of village ratio, population density (number of population per area), investments, and flat-topography village and number of village ratio.

In measuring education developments, it was used four variables. Those were absorbency, accommodation space, productivity, and service power collected from secondary data. The variables used actual users as targets, those were current education-facility users actually utilizing the facilities. The school-aged population was counted by making interval age from a 5-aged group to be one year, then this group was classified based on school age into *SD* (7-12 year old), *SMP* (13-15 year old), *SLTA* (16-18 year old). Statistic analysis was used as a supporting tool to prove the 5 chosen hypothesis: factor analysis and moment product correlation.

The research indicated that, for *SD* level, the education developments had been evenly distributed in all sub-districts and were more defined by service power of schools and teachers and ability of the school in absorbing students. The only external factor influencing the education developments was asphalted village and number of village ratio. On the contrary the imbalance in the education developments was very striking in the level of *SLTP*. There were two sub-districts in the highest rank having one-level-rank difference with other sub-districts. This showed the existence of unevenly distributed education development, only focused in certain sub-districts. Whereas the chosen external factors, no ones influenced the level of *SLTP* education development formed by the number of graduates, education service facilities, and ability to absorb students. For the *SLTA* level, Development Sub-District I (*SWP 1*) achieved the highest rank. By dominated by sub-districts as Service Center I and functioning as district government center, these also influenced education development higher than other *SWP*. Attentions must be directed to other *SWP* to improve their education developments in turn decreasing the occurred imbalance.